

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan mengenai bagaimana bantuan pemerintah dan inisiatif pengembangan kesehatan seperti cakupan JKN, pengeluaran kesehatan, dan ketersediaan tenaga kesehatan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya. Hal ini terjadi karena Kota Surabaya secara aktif mendorong perluasan kepesertaan JKN melalui program Surabaya Sehat, di mana pemerintah kota menanggung iuran JKN bagi masyarakat kurang mampu yang belum tercakup oleh program pemerintah pusat. Dengan semakin luasnya cakupan JKN, masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya, sehingga derajat kesehatan masyarakat meningkat dan berdampak langsung pada peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai komponen utama IPM Kota Surabaya.
2. Belanja Kesehatan terbukti memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya. Hal ini terjadi karena Pemerintah Kota Surabaya secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan di atas 14% dari total APBD, jauh melampaui batas

minimum 10% yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tingginya komitmen fiskal pemerintah di sektor kesehatan memungkinkan perluasan infrastruktur fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas layanan puskesmas, serta penyelenggaraan program promotif dan preventif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Investasi berkelanjutan di sektor kesehatan ini terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh, yang pada akhirnya mendorong peningkatan IPM Kota Surabaya secara signifikan.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya diketahui berpengaruh secara positif dan signifikan oleh ketersediaan tenaga kesehatan bahkan, dari ketiga variabel yang diteliti, variabel inilah yang memiliki pengaruh paling besar, bahkan menjadi variabel dengan pengaruh paling dominan di antara ketiga variabel yang diteliti. Hal ini terjadi karena tenaga kesehatan merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Meskipun pembiayaan JKN dan infrastruktur kesehatan tersedia, efektivitas layanan sangat ditentukan oleh kecukupan dan kompetensi tenaga kesehatan yang melayani masyarakat langsung. Peningkatan rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mendorong peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan primer, sehingga penyakit dapat terdeteksi dan ditangani lebih dini, angka kesakitan menurun, dan angka harapan hidup meningkat, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan IPM secara signifikan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Cakupan JKN memberikan dampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin luas cakupan JKN, maka kualitas pembangunan manusia di Surabaya juga cenderung semakin baik. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)* hingga menyentuh seluruh lapisan penduduk. Upaya ini dapat dilakukan melalui perluasan program subsidi iuran JKN bagi kelompok masyarakat rentan yang belum terdaftar, penyederhanaan mekanisme pendaftaran kepesertaan, serta intensifikasi sosialisasi manfaat JKN kepada masyarakat. Selain itu, pada aspek Belanja Kesehatan, pemerintah diharapkan tidak hanya mempertahankan proporsi anggaran yang telah ada, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaannya dengan lebih memprioritaskan program-program kesehatan preventif dan promotif, seperti imunisasi, skrining penyakit tidak menular, perbaikan sanitasi lingkungan, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak. Program-program tersebut terbukti memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan angka harapan hidup dan komponen IPM lainnya di Kota Surabaya.
2. Pada aspek ketersediaan tenaga kesehatan, makin banyak tenaga

kesehatan yang tersedia maka makin besar pula dampak positif yang diberikan terhadap IPM Kota Surabaya. Kondisi ini diduga terjadi karena dampak dari penambahan tenaga kesehatan tidak bersifat instan, melainkan memerlukan tenggang waktu (*lag*) selama 1 hingga 3 tahun sebelum pengaruhnya dapat dirasakan secara nyata terhadap peningkatan IPM. Tenaga kesehatan yang baru ditempatkan atau direkrut membutuhkan waktu untuk beradaptasi, membangun kepercayaan masyarakat, serta memberi pelayanan yang berdampak langsung pada derajat kesehatan dan kualitas hidup penduduk. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Surabaya tetap perlu menjadikan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan kesehatan jangka menengah. Langkah konkret yang dapat dilakukan meliputi penambahan formasi penerimaan tenaga kesehatan secara terencana dan berkelanjutan, pemberian insentif yang menarik agar tenaga kesehatan terdistribusi merata ke semua wilayah kota, serta penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang ada. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya perlu memperkuat kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi kesehatan, contohnya Universitas Airlangga, guna memastikan pasokan tenaga kesehatan yang kompeten secara berkesinambungan. Dengan investasi yang konsisten dan terencana, ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai diyakini akan mendorong peningkatan kualitas dan

jangkauan layanan kesehatan yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan IPM Kota Surabaya secara signifikan dalam jangka menengah hingga panjang.